Presiden Minta Kegiatan Sekolah Tatap Muka Diawasi Secara Ketat

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta pengawasan kegiatan sekolah tatap muka dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19.

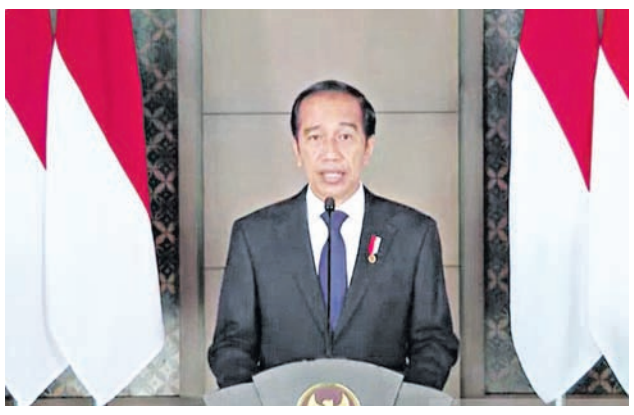
ANTARA/Indra Arief/am

Presiden Joko Widodo

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Jakarta, Senin (15/11).

"Presiden mengarahkan agar sekolah tatap muka dilakukan surveillance yang ketat agar ketika ada indikasi kita bisa melakukan tindakan agar tidak menyebar," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas, di Jakarta.

Budi mengatakan pihaknya memang sudah mengidentifikasi dari pekan ke pekan apabila ada kenaikan jumlah kasus di sejumlah kabupaten dan kota.

Dia menyampaikan pekan lalu berdasarkan observasi Kementerian kesehatan, terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus, di mana beberapa di antaranya juga ada yang sudah tiga minggu berturut-turut mengalami kenaikan kasus. "Sehingga kita melakukan pendalaman. Dan sebagian besar kenaikan disebabkan adanya kenaikan kasus positif di sekolah. Oleh karena itu saya dan pak Nadiem (Mendikbud Ristek, red) akan melakukan konsolidasi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan program sekolah tatap muka tapi dengan surveillance yang aktif dan lebih proaktif," tutur dia.

Adapun dalam rapat terbatas tersebut, Budi mengatakan bahwa Presiden bersyukur kasus aktif COVID-19 sudah menurun. Namun, Presiden meminta semua pihak tetap waspada terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, agar tidak terjadi lonjakan kasus berikutnya. **(ANTARA)**

Menkes Yakin Vaksin di Indonesia Mampu Hadapi Varian Baru COVID-19

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini jenis-jenis vaksin COVID-19 di Indonesia masih cukup ampuh untuk menghadapi varian-varian baru virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Kesimpulan kami, sampai sekarang kalau ada varian virus yang masuk (baik) anak atau cucuya, Insya Allah harusnya kekebalan yang sudah terbentuk masih cukup untuk menanggulangi," katanya saat menyampaikan keterangan di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/11).

Seusai menghadiri rapat terbatas dengan topik "Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)" yang dipimpin Presiden Joko Widodo, menurut Menkes, saat ini berbagai varian virus COVID-19 sudah menyebar di Indonesia. "Memang varian Delta itu kodenya B.1.617.2 itu sudah punya anaknya ada AY.4, AY.23, AY.24, nah... yang terbanyaknya di Indonesia itu anaknya atau sub-variannya AY.23 dan AY.24 malah sudah keluar cucunya AY.4 yaitu AY.4.2 itu yang sekarang banyak di Inggris yang disebut varian Delta Baru," katanya.

Varian-varian tersebut memiliki mutasi genetika yang mirip dengan induk virus. "Nah, di Indonesia sendiri AY.4 sudah ada, AY.23 sudah ada AY.24 sudah ada, AY.4.2 belum ada. Semua varian Delta, anaknya, sub-sub variannya, cucunya itu memiliki mutasi genetik yang mirip," kata Budi Gunadi Sadikin .

Virus corona varian Delta, AY.4.2 diketahui menjadi penyebab meningkatnya paparan kasus COVID-19 hingga 10 persen di Inggris dan sejumlah negara Eropa. Sedangkan varian AY.23 banyak menyebar di Singapura. Di Indonesia sendiri ada 10 jenis vaksin COVID-19 yang disuntikkan ke masyarakat yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Johnson&Johnson, Biofarma, Cansino dan Zifivax.

Menurut catatan Kemenkes per 15 November 2021, sudah ada 130.616. 514 dosis vaksin COVID-19 dosis pertama yang disuntikan atau 62,72 persen sedangkan vaksinasi dosis kedua sudah diberikan sebanyak 84.552.446 dosis.

Sedangkan ada 1.191. 298 dosis vaksinasi dosis 3 yang telah diberikan kepada tenaga kesehatan namun untuk lansia baru ada 9.495.112 dosis pertama (44,05 persen) dan vaksinasi dosis kedua adalah sebesar 5.958.573 dosis. **(ANTARA)**

ANTARA/Desca Lidya Natalia

Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pernyataan pers di Kantor Presiden.

Disdikpora Kulon Progo Berlakukan 25 Persen Kuota Siswa Setiap Kelas

KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberlakukan 25 persen jumlah siswa setiap satu kelas yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka untuk menekan penyebaran COVID-19.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo Eko Teguh Santoso di Kulon Progo, Senin (15/11), mengatakan adapun pelaksanaan teknis 25 persen setiap kelas, yakni jenjang PAUD setiap pertemuan maksimal hanya lima siswa dan satu jam pelajaran, jenjang SD maksimal tujuh siswa lalu SMP maksimal delapan siswa dalam satu kelas.

"Pengaturan pembagian waktu diserahkan penuh kepada sekolah. Hal ini sebagai tindak lanjut kasus penularan di beberapa sekolah yang terdapat siswa terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu, kami resmi mengubah regulasi PTM setelah adanya rapat bersama gugus tugas pada Kamis (11/11)," kata Eko.

ANTARA/Sutarmi

Gugus tugas penanganan COVID-19 di setiap sekolah di Kulon Progo menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ia meminta sekolah melalui kepala sekolahnya juga harus mengawal, mengawasi dan mengontrol penerapan protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan PTM Terbatas ini. Sehingga tidak kembali terjadi klaster baru dalam dunia pendidikan di Kulon Progo. Perubahan aturan PTM terbatas lantaran tingkat penularan atau positifity rate pada beberapa sekolah di Kulon Progo melebihi lima persen.

"Sekolah yang menjadi lokasi penularan wajib ditutup dalam jangka waktu selama 15 hari. Selain itu, apabila ada sekolah yang menjadi lokasi penularan maka pengawas sekolah juga wajib berkoordinasi dengan gugus tugas setempat. Yakni dalam upaya tindak lanjut dan pelaksanaan tracing serta testing pada kontak erat. Serta isolasi bagi siswa yang terkonfirmasi positif," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kulon Progo Baning Rahayujati mengatakan petugas kesehatan yang ada di setiap kecamatan bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kulon Progo telah melakukan swab acak atau surveilans bagi siswa dan guru di sekolah yang melaksanakan PTM. Total, ada 59 sekolah di Kulonp Progo yang menjadi sasaran surveilans pada jenjang SD hingga SMA.

"Untuk jumlah sekolah di Kulon Progo yang sudah melaksanakan swab acak tercatat sudah ada 39 sekolah. Pada minggu ini, kami akan melakukan tes usap secara acak di 17 sekolah yang terdiri dari 11 SD, satu SMP dan lima SMA," katanya. **(ANTARA)**

Dinkes Gunung Kidul Siapkan Penambahan Tempat Tidur RS COVID-19

GUNUNG KIDUL - Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan penambahan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 dan mengaktifkan kembali shelter untuk mengantisipasi gelombang ketiga penyebaran COVID-19 yang diprediksi terjadi pada Februari-Maret 2022.

Kepala Dinkes Gunung Kidul Dewi Irawaty di Gunung Kidul, Senin (15/11), mengatakan libur Natal dan Tahun Baru 2022 bisa menjadi pemicu munculnya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 bila masyarakat tetap memaksakan diri berlibur dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

ANTARA/Sutarmi

Kepala Dinkes Gunung Kidul Dewi Irawaty.

"Libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama. Pada hari libur tersebut diproyeksi akan mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19 pada Februari-Maret 2022. Kami tetap siapkan sesuai porsinya, karena perlu dukungan banyak pihak," kata Dewi.

Ia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skenario penanganan sudah disiapkan menghadapi gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Antara lain menyiapkan kapasitas di rumah sakit (RS) beserta fasilitas pendukung hingga kembali mengaktifkan shelter, namun ingin terburu-buru mengaktifkannya. Alasannya, dibutuhkan tenaga yang tak sedikit jika shelter langsung dibuka dan dioperasikan. "Paling tidak kami perkirakan berapa kebutuhan bed perawatan di RS menghadapi potensi kenaikan kasus," katanya.

Pada sisi lain, Dewi mengharapkan adanya dukungan kuat dari Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di semua tingkatan. Terutama dalam mengedukasi masyarakat terkait kepatuhan protokol kesehatan (prokes). Dinkes tidak bisa melakukan penanganan sendirian. Itu sebabnya, ia menilai harus ada koordinasi dan dukungan dengan banyak pihak dalam menghadapi lonjakan kasus. "Penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama dan tetap taat pada protokol kesehatan," kata Dewi.

Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menilai potensi gelombang ketiga ini masih bersifat kemungkinan. Namun demikian, Pemkab Gunung Kidul tetap waspada mengingat kasus di sejumlah daerah lain kembali merangkak naik. "Harapan kita ini jangan sampai terjadi. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan," kata Sunaryanta. **(ANTARA)**

Pemkot Pekalongan Buka Pos Layanan Vaksinasi di Kelurahan

PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membuka pos layanan kegiatan vaksinasi di setiap kelurahan sebagai upaya melakukan akselerasi cakupan vaksinasi sekaligus mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kini belum selesai.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Senin (15/11) mengatakan bahwa berdasar aplikasi PeduliLindungi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), cakupan vaksinasi untuk dosis pertama secara keseluruhan sudah mencapai 75,40 persen. "Akan tetapi, untuk vaksinasi warga lanjut usia masih sekitar 47 dari target sebesar 60 persen. Angka vaksinasi ini harus terus kami dorong untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 238.410 sasaran orang," katanya.

ANTARA/HO-Humas Kota Pekalongan

Petugas Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sedang melakukan vaksinasi pada warga.

Budiyanto mengatakan mulai pekan ini dan pekan berikutnya, pemkot akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum divaksinasi bisa mendatangi pos pelayanan vaksinasi di seluruh kelurahan.

Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh kelurahan ini akan bekerja sama dengan tim vaksinator yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. "Kami berharap melalui upaya pendekatan layanan vaksinasi pada masyarakat ini bisa meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya melakukan vaksinasi," katanya.

Terkait jumlah kuota vaksinasi yang akan diberikan setiap kelurahan ini, ia mengaku, pemkot masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketersediaan stok vaksin yang ada. "Kami berharap semoga masyarakat mau divaksinasi karena lokasi lebih mudah dan jaraknya dekat, apalagi cakupan vaksinasi khususnya untuk sasaran kalangan lanjut usia (lansia) masih tergolong rendah," katanya. **(ANTARA)**